



ETIKA KEKUASAAN DALAM ISLAM DI TENGAH ALGORITMISASI OTORITAS POLITIK DIGITAL

Ahmad Syairi¹, Muhammad Jaini², Akhmad Fauzan³

^{1,3} Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan, Indonesia, ²Universitas Islam Negeri Antasari
Banjarmasin, Indonesia

Email : ri.sayrii@gmail.com, jainiasdack@gmail.com, lbnuhadinata1990@gmail.com

Received 13-01-2026 | Revised form 19-02-2026 | Accepted 14-04-2026

Abstract

The expansion of digital technology has transformed political power from institutional arenas into algorithmic spaces that subtly yet extensively shape public opinion, legitimacy, and obedience. In this setting, political authority is no longer determined solely by constitutional mandate, but increasingly by visibility, popularity, and the ability to control digital information flows. Islam, as an ethical tradition that conceives power as a trust, provides a normative framework to interpret and critically assess this transformation. This article examines Islamic ethics of power within the context of algorithmic political authority, emphasizing principles of justice, moral responsibility, and the limitation of power. Using a conceptual-normative approach, the discussion highlights the tension between algorithmic logic driven by attention and Islamic ethical demands for integrity and public welfare. The analysis suggests that without ethical grounding, digital power risks generating symbolic manipulation and the erosion of truth, which fundamentally contradict Islamic values of honesty and accountability. Accordingly, Islamic ethics of power can serve as a critical horizon for envisioning a more humane and responsible model of digital political governance.

Keywords: Ethics of Power, Islam, Digital Politics, Algorithms, Authority

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah menggeser wajah kekuasaan politik dari ruang-ruang institusional ke lanskap algoritmik yang membentuk opini, legitimasi, dan kepatuhan publik secara halus namun masif. Dalam konteks ini, otoritas politik tidak lagi semata ditentukan oleh mandat konstitusional, melainkan oleh visibilitas, popularitas, dan kemampuan mengelola arus informasi digital. Islam, sebagai tradisi etika yang memandang kekuasaan sebagai amanah, menawarkan kerangka normatif yang relevan untuk membaca dan mengkritisi fenomena tersebut. Artikel ini membahas etika kekuasaan dalam Islam di tengah algoritmisasi otoritas politik digital dengan menekankan prinsip keadilan, tanggung jawab moral, dan pembatasan kekuasaan. Melalui pendekatan konseptual-normatif, pembahasan diarahkan pada ketegangan antara logika algoritma yang berorientasi pada atensi dan etika Islam yang menuntut integritas serta kemaslahatan publik. Kajian ini menunjukkan bahwa tanpa landasan etika, kekuasaan digital berpotensi melahirkan manipulasi simbolik dan pengaburan kebenaran, yang bertentangan dengan nilai kejujuran dan akuntabilitas dalam Islam. Oleh karena itu, etika kekuasaan Islam dapat berfungsi sebagai horizon kritis untuk merumuskan tata kelola politik digital yang lebih manusiawi dan bertanggung jawab.

Kata Kunci : Etika Kekuasaan, Islam, Politik Digital, Algoritma, Otoritas

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah wajah kekuasaan politik secara substansial. Transformasi ini tidak hanya berkaitan dengan cara kerja lembaga politik formal, tetapi juga berkaitan dengan pembentukan legitimasi, pengaruh opini publik, dan distribusi narasi melalui alat-alat digital yang didukung oleh algoritma. Algoritma, dalam konteks platform digital seperti media sosial dan mesin pencari, berfungsi sebagai mekanisme yang memilih, menyusun, dan menyebarkan informasi secara otomatis berdasarkan parameter tertentu seperti atensi dan interaksi pengguna. Proses ini menghasilkan apa yang oleh banyak peneliti disebut sebagai otoritas algoritmik bentuk kekuasaan yang dibangun di luar struktur institusi formal tetapi memiliki dampak signifikan terhadap persepsi publik dan perilaku politik.

Dalam ranah Islam, kekuasaan politik tradisional dipahami bukan sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai amanah yang harus dijalankan dengan prinsip etika yang kuat, yakni keadilan (*`adl*), tanggung jawab, dan pelayanan terhadap masyarakat. Pemikiran politik Islam klasik dan kontemporer menekankan bahwa institusi kekuasaan harus berlandaskan nilai-nilai yang menjunjung tinggi kemaslahatan umat, kejujuran, dan keseimbangan sosial. Nilai-nilai ini tercermin dalam prinsip-prinsip politik Qur'ani seperti musyawarah (*syura*), tanggung jawab (*amanah*), dan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia.¹

Interaksi antara etika kekuasaan dalam Islam dan fenomena algoritmisasi otoritas politik digital memunculkan tantangan baru yang kompleks. Di satu sisi, teknologi digital membuka peluang partisipasi politik yang lebih luas, akses informasi yang cepat, dan keterlibatan warga dalam debat publik. Di sisi lain, dominasi algoritma atas ruang digital sering kali mendorong optimasi konten yang menguntungkan popularitas atau engagement, bukan kualitas substansi atau kebenaran informasi. Hal ini berpotensi menghasilkan manipulasi simbolik, bias informasi, dan disinformasi yang dapat mengaburkan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran—nilai-nilai yang fundamental dalam etika kekuasaan Islam.

Sejumlah kajian kontemporer dalam kajian Islam dan teknologi berupaya menangkap persoalan etika teknologi dan digital dari perspektif Islam. Misalnya, pemikiran tentang digital freedom yang dikaitkan dengan moralitas dan nilai-nilai Islam menunjukkan bahwa prinsip-prinsip seperti amanah dan *tabayyun* (klarifikasi/cek kebenaran) dapat menjadi orientasi moral untuk menghadapi dominasi algoritma dalam ruang digital. Selain itu, penelitian lain menyoroti bagaimana *maqāṣid al-sharī'ah* (tujuan syariah) dapat diaplikasikan sebagai kerangka moral untuk tata kelola etika kecerdasan buatan dan sistem digital lainnya, termasuk prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak dasar.²

Dengan demikian, penting untuk menyusun kajian konseptual yang mempertemukan ketegasan etika kekuasaan dalam Islam dengan dinamika otoritas politik yang dimediasi oleh algoritma digital. Kajian semacam ini tidak hanya relevan secara teoritis dalam memahami

¹ Ikrar Hakiki dkk., "Politik Dalam Al Qur'an," *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4 (2025): 770–75, <https://doi.org/10.63822/9qjke66>.

² Uthman Mohammed Mustapha Kannike dan AbdulGafar Olawale Fahm, "Exploring The Ethical Governance of Artificial Intelligence from An Islamic Ethical Perspective," *Jurnal Fiqh* 22, no. 1 (2025): 134–61, <https://doi.org/10.22452/fiqh.vol22no1.5>.

tantangan modernitas digital, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam merumuskan prinsip-prinsip etika dan kebijakan yang dapat membimbing praktik politik digital agar tetap berpegang pada nilai-nilai moral yang mendasar.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual-normatif untuk mengkaji etika kekuasaan dalam Islam di tengah fenomena algoritmisasi otoritas politik digital. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian tidak diarahkan pada pengukuran empiris atau pengumpulan data lapangan, melainkan pada analisis makna, nilai, dan prinsip normatif yang membentuk relasi antara kekuasaan, moralitas, dan teknologi digital. Dengan pendekatan ini, kekuasaan dipahami sebagai konsep etis yang memiliki dimensi moral dan tanggung jawab, bukan semata sebagai praktik teknis atau instrumen politik.

Sumber data penelitian terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi Al-Qur'an dan Hadis yang memuat prinsip-prinsip dasar tentang amanah, keadilan, tanggung jawab, dan pembatasan kekuasaan. Sumber sekunder mencakup literatur klasik dan kontemporer dalam pemikiran politik Islam, etika Islam, serta kajian akademik yang membahas algoritma, otoritas digital, dan politik di era teknologi informasi. Literatur tersebut diperoleh melalui penelusuran jurnal ilmiah, buku akademik, dan publikasi daring yang relevan dengan tema penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri dan mengkaji teks-teks normatif serta literatur akademik yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek kajian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis konseptual dan hermeneutik, yakni dengan menafsirkan konsep-konsep kunci secara kontekstual dan mengaitkannya dengan realitas politik digital kontemporer. Analisis ini diarahkan untuk menemukan relasi, ketegangan, dan kemungkinan sintesis antara logika algoritmik yang bekerja dalam ruang digital dan etika kekuasaan Islam yang menekankan integritas moral serta kemaslahatan publik.

Hasil analisis selanjutnya disusun melalui sintesis argumentatif untuk merumuskan kerangka pemahaman etis yang mampu menjelaskan posisi dan relevansi etika kekuasaan Islam dalam menghadapi dominasi algoritma sebagai sumber baru otoritas politik. Dengan metode ini, penelitian diharapkan tidak hanya memberikan deskripsi teoretis, tetapi juga menawarkan refleksi kritis yang berkontribusi pada pengembangan wacana etika politik Islam dalam konteks digital.

C. ISI DAN PEMBAHASAN

Algoritmisasi Kekuasaan Politik Digital dan Dislokasi Etika Otoritas

Algoritmisasi dalam politik digital menunjuk pada peran algoritma sebagai mekanisme yang tidak hanya mengatur distribusi konten media sosial tetapi juga membentuk struktur otoritas baru dalam ruang publik digital. Algoritma dalam platform seperti TikTok, Facebook, atau YouTube bekerja dengan cara menganalisis pola perilaku pengguna untuk menampilkan konten yang memiliki kemungkinan tinggi mendapatkan keterlibatan, yang secara implisit membuatnya menjadi aktor yang menentukan narasi politik mana yang dominan dalam pengalaman pengguna. Studi empiris menunjukkan bahwa algoritma ini tidak hanya menyajikan konten, tetapi turut

menentukan cara opini politik terbentuk karena filter algoritmik menciptakan ruang gema di mana konten yang menarik secara emosional atau hiburan sering kali muncul lebih sering daripada konten yang berisi analisis politik yang mendalam. Kondisi ini memperlihatkan pergeseran besar dari otoritas politik tradisional yang biasanya bergantung pada proses deliberatif dan legitimasi formal ke bentuk otoritas digital yang bekerja melalui logika keterlibatan data-driven.³

Pergeseran ini berkontribusi pada pembentukan filter bubble dan echo chamber yang semakin menguat di antara pengguna politik digital. Penelitian dalam jurnal komunikasi mengungkap bahwa algoritma dapat memperkuat preferensi yang sudah ada sehingga pengguna lebih sering melihat konten yang sejalan dengan pandangan mereka, sementara konten dengan perspektif berbeda semakin jarang muncul dalam linimasa mereka. Dampaknya adalah fragmentasi informasi yang tajam sehingga ruang dialog publik menjadi sempit dan lebih terpolarisasi. Dalam konteks politik digital, fragmentasi tersebut tidak sekadar mengurangi keragaman informasi tetapi juga mengganti cara masyarakat memahami kebenaran politik karena akses terhadap informasi yang beragam semakin dipengaruhi oleh logika algoritma yang bertujuan memaksimalkan engagement, bukan memfasilitasi deliberasi yang adil dan inklusif.⁴

Algoritma juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap polarisasi politik dalam konteks demokrasi digital. Penelitian menunjukkan bahwa saat rancangan algoritma mengutamakan keterlibatan melalui logika emotif dan dramatis, konten yang sifatnya memecah belah atau memperkuat perbedaan cenderung tumbuh subur di ruang digital. Hal ini menunjukkan bahwa algoritma dapat tidak sengaja memperkuat bias sosial dan politis yang ada, yang kemudian memperdalam polarisasi. Misalnya, dalam studi yang meneliti algoritma di Indonesia selama kontestasi pemilu, ditemukan bahwa konten yang lebih sensasional dan emosional memiliki peluang lebih tinggi untuk menjadi viral dibanding konten yang bersifat informatif dan rasional, yang pada akhirnya mengubah karakter dialog politik digital dari substansi menuju performativitas.⁵

Peran algoritma dalam membentuk narasi politik digital juga berdampak pada legitimasi politik karena algoritma membantu menentukan siapa yang mendapatkan perhatian publik. Dalam politik kontestasi, aktor politik yang mampu memanfaatkan logika algoritma untuk memaksimalkan visibilitas konten mereka memiliki keuntungan besar dalam membentuk opini publik. Fenomena ini menciptakan apa yang disebut modal algoritmik, yaitu sumber kekuasaan baru yang diperoleh melalui kemampuan untuk tampil dominan di ruang digital. Ketergantungan pada algoritma ini pada akhirnya menggeser otoritas politik dari proses politik formal dan

³ Muhammad Guntur Purboyo dkk., "Ambivalensi Politik Digital: Algoritma, Gamifikasi, Dan Polarisasi Generasi Z Di TikTok," *Jurnal Sosiologi Andalas*, 11 Oktober 2025, 172–90, <https://doi.org/10.25077/jsa.11.2.172-190.2025>.

⁴ Tri Wahyuti dkk., "ALGORITMA, ECHO CHAMBER, POLARISASI, DAN VIRALITAS DI TIKTOK PADA PEMILIHAN PRESIDEN 2024," *Konvergensi : Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 6, no. 2 (2025): 264–78, <https://doi.org/10.51353/5f442c71>.

⁵ Wahyuti dkk., "ALGORITMA, ECHO CHAMBER, POLARISASI, DAN VIRALITAS DI TIKTOK PADA PEMILIHAN PRESIDEN 2024."

institusional ke ranah digital yang dikontrol oleh sistem komputasi, yang sering kali tidak tunduk pada prinsip transparansi dan akuntabilitas etis.⁶

Dinamika algoritmisasi juga melahirkan tantangan etika yang tidak sederhana karena algoritma tidak dirancang dengan prinsip moral eksplisit, tetapi lebih pada efisiensi teknis dalam memaksimalkan keterlibatan. Dalam literatur etika digital, hal ini dipahami sebagai pergeseran dari otoritas moral menuju otoritas teknis, di mana keputusan tentang apa yang dilihat publik ditentukan oleh mekanisme yang tidak memperhitungkan nilai keadilan atau tanggung jawab sosial. Ketika algoritma menciptakan hierarki visibilitas konten politik secara otomatis, masyarakat kehilangan kendali atas ruang informasi yang mereka konsumsi. Ini menunjukkan dislokasi etika otoritas dalam politik digital, di mana nilai moral dalam penyebaran informasi semakin tergeser oleh logika teknis yang netral secara moral tetapi memiliki dampak politis yang besar.⁷

Penelitian lain tentang konstruksi realitas sosial melalui algoritma memperlihatkan bahwa algoritma tidak netral, tetapi memengaruhi cara masyarakat mengartikan realitas sosial dan politiknya. Algoritma berperan dalam proses seleksi, personalisasi, dan prioritas konten yang secara struktural membentuk cara pengguna melihat suatu isu politik, budaya, atau sosial. Dalam konteks Indonesia, penelitian menunjukkan bahwa algoritma tidak hanya menciptakan bentuk representasi sosial yang dipilih berdasarkan preferensi digital, tetapi juga berinteraksi dengan dinamika kultural dan sosial yang ada, sehingga realitas sosial yang dibentuk di ruang digital memiliki implikasi kuat terhadap hubungan sosial nyata di masyarakat. Bentuk konstruksi ini menunjukkan bahwa algoritma bukan sekadar alat distribusi informasi tetapi juga agen struktural dalam produksi makna sosial politik, yang memperdalam dislokasi antara moral publik dan logika teknis digital.⁸

Akibat dari struktur otoritas baru ini adalah tantangan bagi demokrasi digital itu sendiri karena kualitas deliberasi publik menjadi terganggu. Algoritma yang bekerja melalui logika keterlibatan cenderung mempromosikan konten yang memperkuat sentimen emosional dan memperkuat perbedaan, yang berpotensi mendorong fragmentasi sosial dan konflik identitas politik. Dalam demokrasi tradisional, legitimasi politik biasanya dibentuk melalui proses argumentatif dan pertukaran ide yang adil di ruang publik, tetapi algoritma digital memampatkan proses ini menjadi bentuk konsumsi cepat yang lebih mengutamakan ulang tayang atau klik daripada refleksi kritis. Hal ini memperlihatkan tantangan besar bagi kualitas demokrasi digital karena masyarakat lebih mudah terekspos pada konten polarisatif daripada konten informatif yang membangun pemahaman politik yang matang.⁹

Selain itu, algoritma berperan dalam mempersempit ruang dialog politik karena mekanisme filter bubble yang diciptakan oleh algoritma memperkuat preferensi pengguna

⁶ Wahyuti dkk., "ALGORITMA, ECHO CHAMBER, POLARISASI, DAN VIRALITAS DI TIKTOK PADA PEMILIHAN PRESIDEN 2024."

⁷ Sultan Akribu Fathilah dkk., "Konstruksi Realitas Sosial Melalui Algoritma Media Digital Dalam Perspektif Ilmu Sosial Modern Indonesia," *PERSEPTIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 3, no. 4 (2025): 174–82, <https://doi.org/10.70716/perseptif.v3i4.453>.

⁸ Fathilah dkk., "Konstruksi Realitas Sosial Melalui Algoritma Media Digital Dalam Perspektif Ilmu Sosial Modern Indonesia."

⁹ Yassirli Amri dan Lara Indah Yandri, *ALGORITMA MEDIA SOSIAL DAN POLARISASI POLITIK DALAM DEMOKRASI DIGITAL DI INDONESIA*, 4, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.31869/jsp.v4i2.7608>.

secara berulang. Pengguna yang terus menerus melihat konten yang serupa menjadi kurang terpapar pada pandangan alternatif, sehingga kemungkinan untuk berdiskusi dengan mereka yang memiliki sudut pandang berbeda semakin rendah. Hal ini menyebabkan kecenderungan masyarakat digital untuk menguatkan keyakinan awal mereka tanpa melalui proses tabayyun atau verifikasi argumentatif, yang seharusnya menjadi bagian esensial dari wacana politik yang sehat. Disfungsi semacam ini menunjukkan bahwa algoritma menjadi mekanisme distribusi informasi yang membatasi ruang demokrasi deliberatif, sehingga berdampak pada kualitas legitimasi politik.¹⁰

Dislokasi etika otoritas politik digital menunjukkan bahwa struktur kekuasaan politik kini dipengaruhi oleh dinamika yang jauh lebih kompleks daripada sekadar hubungan antara pemilih dan pemimpin politik. Ketika algoritma memediasi hubungan ini, masyarakat perlu memperhatikan bahwa otoritas yang dianggap sebagai representasi kehendak publik mungkin merupakan hasil dari logika komputasi yang tidak memperhatikan nilai moral fundamental seperti keadilan, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas terhadap algoritma menjadi bagian penting dari upaya menjaga legitimasi politik digital, tetapi tantangan ini tidak mudah karena algoritma sering kali dianggap sebagai hak milik perusahaan teknologi dan tidak terbuka untuk pengawasan publik.¹¹

Secara keseluruhan, literatur akademik menunjukkan bahwa algoritmisasi kekuasaan politik digital telah menciptakan dislokasi etika otoritas yang signifikan, di mana mekanisme distribusi informasi digital menjadi lebih dominan daripada prinsip moral dalam pembentukan opini publik. Tantangan ini menuntut penelitian lebih lanjut dan kebijakan yang mampu menyeimbangkan antara inovasi teknologi dan tanggung jawab etis, termasuk meningkatnya literasi digital politik masyarakat dan regulasi yang memastikan keterbukaan algoritma dalam konteks politik. Dengan demikian, pemahaman mendalam tentang hubungan antara algoritma, kekuasaan, dan etika otoritas politik digital menjadi sangat penting bagi perkembangan demokrasi di era informasi.¹²

Pergeseran Otoritas Keagamaan dan Politik Islam di Ruang Digital

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam struktur otoritas keagamaan di masyarakat Muslim kontemporer, terutama melalui media sosial, platform berbagi video, dan website keagamaan yang dipandu oleh logika algoritma. Studi tentang fenomena influencer Muslim di media sosial menunjukkan bahwa interpretasi keagamaan yang dulu eksklusif dalam ranah ulama formal kini menjadi lebih terbuka bagi aktor digital yang memiliki keterampilan komunikasi dan jaringan pengikut yang luas, sehingga struktur otoritas tradisional mengalami tantangan baru dalam era digital. Penelitian ini menemukan bahwa visibilitas dan keterlibatan audiens menjadi faktor penting dalam pembentukan otoritas

¹⁰ Amri dan Yandri, *ALGORITMA MEDIA SOSIAL DAN POLARISASI POLITIK DALAM DEMOKRASI DIGITAL DI INDONESIA*.

¹¹ Amri dan Yandri, *ALGORITMA MEDIA SOSIAL DAN POLARISASI POLITIK DALAM DEMOKRASI DIGITAL DI INDONESIA*.

¹² Purboyo dkk., "Ambivalensi Politik Digital."

interpretatif di ruang digital, yang sebelumnya sangat bergantung pada legitimasi keilmuan dan sanad tradisional.¹³

Dalam ruang digital, praktik tafsir Alquran mengalami transformasi signifikan karena bentuk penyampaian konten yang bersifat visual, interaktif, dan dikurasi oleh algoritma platform seperti YouTube dan TikTok. Studi yang menganalisis tafsir digital menemukan bahwa otoritas tafsir tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh kriteria ilmiah klasik, tetapi oleh popularitas konten dan tingkat keterlibatan digital, sehingga penafsiran keagamaan kini menempatkan algoritma sebagai salah satu mediator utama. Temuan ini menunjukkan adanya pergeseran dari otoritas berbasis sanad dan kompetensi ilmiah menuju bentuk otoritas yang didukung oleh performativitas digital dan respon audiens.¹⁴

Transformasi otoritas keagamaan ini tidak hanya berimplikasi pada tafsir teks suci tetapi juga pada pola pemahaman keagamaan masyarakat luas. Studi tentang akses dan pola perilaku orang dalam mengakses situs keagamaan juga menunjukkan bahwa perilaku pengguna digital mengubah cara mereka membentuk pemahaman keagamaan, karena sumber ajaran Islam kini bisa diakses dari berbagai aktor yang tersebar di dunia maya. Pergeseran semacam ini menunjukkan bahwa struktur otoritas tradisional yang dulunya bersifat hierarkis kini berubah menjadi lebih desentralistik dan partisipatif, namun sekaligus memunculkan risiko fragmentasi interpretasi yang melemahkan keseragaman nilai keagamaan.¹⁵

Perubahan tersebut juga tercatat dalam dinamika dakwah Islam di ruang digital, di mana praktik dakwah tidak hanya dilakukan oleh lembaga keagamaan formal tetapi juga oleh individu yang memiliki kehadiran kuat dalam dunia maya. Kajian mengenai negosiasi otoritas keagamaan di platform online menemukan bahwa konten dakwah yang dikelola secara profesional di media sosial dapat menjadi penghubung antara pemuka agama kompeten dan masyarakat digital, yang sekaligus menuntut pemuka agama untuk menyesuaikan representasi diri mereka dalam pola interaksi yang berubah. Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa ruang digital membuka ruang negosiasi baru dalam konstruksi otoritas yang tidak hanya mengandalkan legitimasi tradisional tetapi juga kemampuan adaptasi terhadap dinamika digital.

Fragmentasi otoritas keagamaan di ruang digital juga terlihat dalam kajian yang menekankan peran media baru dalam membentuk otoritas Islam di masa kini, yang meliputi pergeseran dari otoritas ulama tradisional ke aktor agama yang memanfaatkan kapabilitas digital. Studi ini menemukan bahwa perkembangan media baru memungkinkan munculnya figur keagamaan baru yang memperoleh legitimasi melalui mekanisme visibilitas digital yang dipengaruhi oleh algoritma, pengetahuan media sosial, dan citra diri daring. Hasil temuan ini

¹³ Aulia Karimatul Ma'rifat, "Mrs Fenomena Influencer Muslim dan Otoritas Penafsiran Al-Qur'an di Era Digital: Kajian atas Pergeseran Otoritas Keagamaan di Media Sosial," *JURNAL PUSAKA: Media Kajian dan Pemikiran Islam* 15, no. 1 (2025): 52–61, <https://doi.org/10.35897/ps.v15i1.1965>.

¹⁴ Dina Istiqomah dkk., "Tafsir Digital: Antara Adaptasi Dan Krisis Otoritas Keagamaan," *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi* 4, no. 1 (2025): 41–56, <https://doi.org/10.31958/lathaif.v4i1.15416>.

¹⁵ Mila Faila Shofa dkk., "DIGITAL RELIGION AND SHIFTING RELIGIOUS AUTHORITY: UNDERSTANDING PEOPLE'S BEHAVIOUR IN ACCESSING ISLAMIC WEBSITES," *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat* 22, no. 1 (2025): 118–46, <https://doi.org/10.22515/ajpif.v22i1.10454>.

mempertegas bahwa otoritas keagamaan tidak lagi bersifat monolitik dan terpusat, tetapi tersebar melalui berbagai aktor yang memanfaatkan media digital dengan cara yang berbeda.¹⁶

Dengan munculnya aktor keagamaan baru di ruang digital, tantangan kebijakan dan moderasi keagamaan menjadi semakin kompleks. Salah satu aspek yang muncul adalah bagaimana organisasi keagamaan besar mencoba mempromosikan moderasi beragama melalui media digital sebagai respons terhadap fragmen informasi yang cepat dan fragmentasi otoritas. Studi tersebut menunjukkan bahwa ruang digital yang bebas akses dapat dimanfaatkan untuk menyuburkan konflik naratif maupun mempromosikan narasi moderat, sehingga moderasi beragama menjadi elemen penting dalam menghadapi pengaruh algoritma yang dapat memperkuat polarisasi dan interpretasi ekstrem.¹⁷

Selain itu, pemanfaatan media digital oleh ulama tradisional juga menunjukkan pola adaptasi dalam konteks pergeseran otoritas. Penelitian tentang konfigurasi kembali otoritas Islam di Indonesia mengungkapkan bahwa banyak ulama tradisional membuat kehadiran digital mereka sendiri untuk tetap relevan dan mampu bersaing dengan figur agama baru di platform digital. Meskipun demikian, studi ini menemukan bahwa ulama sering kali mengalami kesulitan untuk menyaingi daya tarik visual dan strategi komunikasi yang digunakan oleh influencer agama digital, yang semakin menunjukkan bahwa legitimasi otoritas kini juga ditentukan oleh aspek jaringan digital dan strategi pemasaran konten.¹⁸

Sejalan dengan itu, kajian tentang pendidikan Islam dan media baru menunjukkan bahwa transformasi otoritas keagamaan juga berdampak pada cara generasi muda memaknai dan mempraktikkan ajaran Islam. Media digital membuka akses yang lebih luas terhadap konten keagamaan, namun juga menyebabkan otoritas menjadi cair dan berbasis popularitas serta kedekatan emosional antara pembicara dan audiens. Studi ini menemukan bahwa generasi muda kini lebih memilih narasi keagamaan yang relevan dengan pengalaman hidup mereka di ruang digital, yang sering kali berbeda dengan pendekatan pendidikan agama formal yang lebih tradisional dan berorientasi pada keteraturan institusional keilmuan.

Perubahan ini menunjukkan bahwa ruang digital tidak hanya memengaruhi siapa yang memiliki suara dalam wacana keagamaan tetapi juga bagaimana otoritas itu dipahami dan dinikmati oleh masyarakat muslim. Transformasi otoritas keagamaan di era digital bukan hanya tentang siapa yang memiliki legitimasi untuk berbicara tetapi juga bagaimana audiens menentukan legitimasi tersebut berdasarkan kriteria yang terus berkembang dalam ranah digital, termasuk popularitas digital, estetika konten, interaksi audiens, serta kemampuan untuk menciptakan komunitas online yang kuat dan loyal.¹⁹

¹⁶ Rahmat Hidayatullah, "Otoritas Keagamaan Digital: Pembentukan Otoritas Islam Baru Di Ruang Digital," *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 2024, 1–16, <https://doi.org/10.15408/ushuluna.v10i2.42831>.

¹⁷ Wildani Hefni, "Moderasi Beragama Dalam Ruang Digital: Studi Pengarusutamaan Moderasi Beragama Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri," *Jurnal Bimas Islam* 13, no. 1 (2020): 1–22, <https://doi.org/10.37302/jbi.v13i1.182>.

¹⁸ Anam Besari dkk., "Reconfiguring Islamic Authority in Indonesia: The Role of Ulama and Digital Media in Religious Practices," *Journal of Noesantara Islamic Studies* 2, no. 3 (2025): 139–51, <https://doi.org/10.70177/jnis.v2i3.2396>.

¹⁹ Istiqomah dkk., "Tafsir Digital."

Implikasi dari pergeseran otoritas ini sangat luas, karena tidak hanya memengaruhi struktur hierarki tradisional dalam keagamaan tetapi juga pola hubungan antara umat dan narator keagamaan di ranah digital. Dalam kondisi ini, masyarakat muslim di era digital menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan antara warisan tradisional ulama dengan dinamika otoritas digital yang semakin demokratis namun rentan terhadap penyebaran interpretasi yang tidak berdasar. Tantangan ini menuntut adanya kerangka etika dan kebijakan yang mampu mempertahankan otoritas moral dan keilmuan dalam ruang digital tanpa mengabaikan peluang positif yang ditawarkan oleh teknologi digital dalam memperluas akses terhadap pengetahuan keagamaan.²⁰

Rekonstruksi Etika Kekuasaan Islam dalam Tata Kelola Politik Digital

Rekonstruksi etika kekuasaan Islam dalam tata kelola politik digital bermula dari pemahaman bahwa kekuasaan yang bersifat normatif dalam tradisi Islam selalu diposisikan sebagai amanah yang harus dijalankan dengan prinsip moral yang kuat dan tanggung jawab sosial yang tinggi, bukan sebagai alat dominasi semata sehingga setiap kebijakan politik digital harus berakar pada nilai-nilai etika Islam yang mengedepankan keadilan dan kemaslahatan publik. Konsep ini berakar dari prinsip hakiki maqāṣid al-syarī'ah yang menuntut perlindungan terhadap nilai-nilai fundamental seperti keadilan, kepercayaan, kebebasan beragama serta kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan, sehingga tata kelola politik digital yang baik harus mampu mengakomodasi nilai-nilai tersebut bukan sekedar logika teknis atau optimasi algoritma semata.

Prinsip amanah dalam Islam menunjukkan bahwa kekuasaan politik digital harus dilandasi oleh tanggung jawab moral yang melampaui sekedar pencapaian statistik atau popularitas digital, karena amanah mengharuskan setiap aktor politik untuk memegang teguh komitmen moral terhadap publik dan untuk menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Karena itu, rekonstruksi etika kekuasaan Islam dalam konteks digital harus melibatkan prinsip amanah sebagai landasan pokok dalam merumuskan kebijakan digital yang mempengaruhi opini publik, privasi data warga negara serta cara algoritma menyebarkan informasi politik.²¹

Relevansi maqāṣid al-syarī'ah sebagai kerangka normatif untuk tata kelola kekuasaan digital menjelaskan bahwa setiap penerapan teknologi seperti kecerdasan buatan atau sistem rekomendasi dalam konteks politik harus mempertimbangkan nilai-nilai etika yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan perlindungan terhadap bahaya moral serta sosial yang mungkin timbul, karena tanpa landasan nilai ini, teknologi digital berpotensi menimbulkan manipulasi atau pelanggaran terhadap hak asasi melalui praktik-praktik yang merugikan kepentingan umum. Rekonstruksi etika tata kelola digital dengan maqāṣid al-syarī'ah sebagai dasar dapat membantu merumuskan mekanisme etika yang tidak hanya responsif terhadap teknologi, tetapi juga memperkuat nilai moral Islam dalam ranah politik.²²

²⁰ Hidayatullah, "Otoritas Keagamaan Digital."

²¹ Mawloud Mohadi dan Yasser Tarshany, "Maqasid Al-Shari'ah and the Ethics of Artificial Intelligence: Contemporary Challenges," *Journal of Contemporary Maqasid Studies* 2 (Juli 2023): 79–102, <https://doi.org/10.52100/jcms.v2i2.107>.

²² Mohadi dan Tarshany, "Maqasid Al-Shari'ah and the Ethics of Artificial Intelligence."

Selain itu, kajian tentang *digital fiqh governance* memberikan kerangka teoritis yang mampu menjembatani tradisi etika hukum Islam dengan tantangan digital kontemporer dengan mengevaluasi bagaimana norma-norma Islam seperti tanggung jawab moral, keterbukaan dan kontrol sosial dapat direfleksikan dalam struktur regulasi digital yang adil dan inklusif. *Digital Fiqh Governance* menjadi penting karena algoritma dan praktik digital modern dapat mempengaruhi persepsi moral publik serta swadaya komunitas Muslim terhadap konten politik, sehingga diperlukan suatu sistem aturan yang disusun berdasarkan fiqh kontemporer yang mampu memadukan norma hukum Islam dan realitas digital.²³

Dalam dinamika tata kelola politik digital, prinsip musyawarah atau consultative deliberation yang juga merupakan bagian integral dari tradisi etika politik Islam dapat diterapkan sebagai landasan partisipatif di mana seluruh pemangku kepentingan memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan regulasi digital serta algoritma yang mempengaruhi kehidupan politik. Prinsip musyawarah ini relevan untuk menciptakan mekanisme tata kelola digital yang lebih demokratis dan menghormati pluralitas suara publik sehingga bukan hanya elit teknologi atau politisi yang memiliki kendali atas narasi digital, tetapi juga masyarakat sebagai pemegang amanah kebijakan digital.²⁴

Ketika membahas tata kelola politik digital yang etis, penting untuk mengintegrasikan nilai keadilan ('adl) dalam setiap aspek regulasi teknologi, termasuk pertimbangan terhadap bias algoritmik, privasi data, serta hubungan antara aktor digital dan komunitas politik. Keadilan dalam etika kekuasaan Islam tidak hanya dilihat sebagai persamaan formal tetapi juga perlakuan proporsional yang mempertimbangkan dampak sosial teknologi terhadap kelompok rentan, sehingga tata kelola digital politik harus memperhatikan perangkat kebijakan yang menjamin keterlibatan masyarakat tanpa diskriminasi dan pemaksaan narasi tertentu.²⁵

Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan bagian dari tata kelola etika kekuasaan Islam juga sangat penting dalam konteks politik digital, karena tanpa mekanisme yang terbuka dan bertanggung jawab, algoritma dan sistem digital dapat digunakan secara ilegal atau manipulatif untuk mempengaruhi opini publik, menyebarkan disinformasi, atau memperkuat bias tertentu. Integrasi nilai amanah dan transparansi dalam kebijakan digital dapat membantu memastikan bahwa kekuasaan digital tunduk pada kontrol moral yang kuat sehingga kegiatan politik yang terjadi online tetap berlandaskan pada prinsip kejujuran dan tanggung jawab sosial.²⁶

Kerangka etika governance berbasis nilai-nilai Islam juga menuntut pendekatan normatif dalam merumuskan kode etik politisasi digital yang menolak praktik propaganda yang bertentangan dengan maqāṣid al-syarī'ah seperti penyebaran hoaks atau manipulasi data yang bisa merusak keharmonisan masyarakat. Kajian kontemporer tentang etika digital dalam Islam

²³ Muhammad Habibi Siregar, *Digital Fiqh and Ethical Governance: Negotiating Islamic Normativity and Online Narcissism in Contemporary Indonesia*, t.t.

²⁴ "Shura," *Wikipedia*, 7 Desember 2025, <https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Shura&oldid=1326231715>.

²⁵ Zahron Abdurrahman, "Islamic ethical governance: An integrated model for corruption prevention," *Kurva Jurnal Ekonomi Manajemen Keuangan dan Bisnis* 2 (April 2025): 1–19, <https://doi.org/10.53088/kurva.v2i2.2245>.

²⁶ Abdurrahman, "Islamic ethical governance."

menegaskan bahwa penggunaan teknologi digital harus secara eksplisit mempertimbangkan nilai keadilan, amanah, serta perlindungan terhadap bahaya sosial seperti ujaran kebencian atau kebohongan politik agar tata kelola digital tidak menjadi instrumen yang eksploitatif.

Selain itu, pendidikan literasi digital yang dikembangkan dengan landasan etika Islam menjadi aspek strategis dalam rekonstruksi etika tata kelola politik digital karena masyarakat yang memiliki pemahaman moral dan etis terhadap penggunaan teknologi akan lebih mampu menilai dampak algoritma terhadap kehidupan politik serta bersikap kritis terhadap konten digital. Pendidikan etika digital Islami dapat memperluas kesadaran publik tentang tanggung jawab moral mereka sebagai pengguna teknologi sekaligus sebagai warga negara dalam ranah politik digital, sehingga kekuasaan digital tidak terlepas dari kontrol moral masyarakat muslim secara luas.²⁷

Rekonstruksi etika kekuasaan Islam dalam tata kelola politik digital pada akhirnya mengarah pada pembentukan suatu model governance yang mengintegrasikan prinsip moral Islam dan teknologi modern, di mana nilai seperti keadilan, amanah, keterbukaan, dan musyawarah menjadi penopang utama bagi penerapan teknologi digital dalam politik. Model governance ini tidak hanya bersifat normatif tetapi juga operasional, mendorong pembuat kebijakan, pengembang teknologi, dan masyarakat Muslim untuk bersama-sama menciptakan ruang digital yang adil, bertanggung jawab, dan bermartabat, sehingga kekuasaan dalam politik digital tidak mengorbankan nilai moral demi efisiensi teknis semata.

KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa algoritmisasi telah mengubah secara fundamental cara kekuasaan politik dan keagamaan bekerja di ruang publik digital. Otoritas tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh legitimasi institusional, kapasitas keilmuan, atau prosedur deliberatif formal, melainkan semakin bergantung pada visibilitas, popularitas, dan kemampuan menyesuaikan diri dengan logika algoritma yang berorientasi pada atensi. Perubahan ini menghasilkan bentuk kekuasaan baru yang bersifat tidak langsung, terfragmentasi, dan sering kali sulit dipertanggungjawabkan secara etis karena bekerja melalui mekanisme teknis yang tampak netral, namun memiliki dampak politis dan moral yang sangat nyata.

Dalam perspektif Islam, kondisi tersebut menandai terjadinya dislokasi etika otoritas. Kekuasaan yang seharusnya dipahami sebagai amanah dengan tuntutan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial, berisiko direduksi menjadi sekadar kemampuan menguasai arus informasi dan memanipulasi perhatian publik. Logika algoritmik yang mengutamakan engagement dan performativitas bertentangan secara mendasar dengan etika kekuasaan Islam yang menuntut integritas moral, perlindungan kemaslahatan, serta pembatasan kekuasaan agar tidak merusak tatanan sosial dan kebenaran publik.

Pergeseran otoritas keagamaan di ruang digital mempertegas persoalan ini. Fragmentasi otoritas, munculnya figur keagamaan berbasis popularitas, dan melemahnya kriteria keilmuan tradisional menunjukkan bahwa algoritma tidak hanya memediasi informasi, tetapi juga ikut menentukan siapa yang dianggap sah untuk berbicara atas nama agama dan politik. Situasi ini

²⁷ Sajida Khoirulloh Telfah dkk., "Etika Bermedia Digital Dalam Perspektif Pendidikan Islam," *Al-Ilmiya: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 4 (2026): 1441–51.

membuka peluang demokratisasi wacana, tetapi sekaligus membawa risiko banalitas ajaran, simplifikasi etika, dan penyebaran interpretasi yang lepas dari tanggung jawab ilmiah dan moral. Melalui kerangka etika kekuasaan Islam, khususnya prinsip amanah, keadilan, musyawarah, transparansi, dan maqāṣid al-syarī‘ah, penelitian ini menegaskan perlunya rekonstruksi tata kelola politik digital yang tidak tunduk sepenuhnya pada rasionalitas teknis. Etika Islam menyediakan horizon normatif untuk menilai, mengkritik, dan membatasi kekuasaan algoritmik agar tetap berpihak pada kebenaran, keadilan sosial, dan martabat manusia. Rekonstruksi ini tidak berhenti pada tataran moral abstrak, tetapi menuntut implikasi praktis berupa regulasi yang akuntabel, desain algoritma yang lebih etis, serta penguatan literasi digital berbasis nilai.

Dengan demikian, etika kekuasaan Islam relevan bukan sebagai nostalgia normatif, melainkan sebagai sumber kritik dan orientasi etis dalam menghadapi politik digital kontemporer. Tanpa pijakan etika yang kuat, kekuasaan digital berpotensi melahirkan manipulasi simbolik dan erosi kebenaran. Sebaliknya, dengan menjadikan nilai-nilai etika Islam sebagai dasar, politik digital dapat diarahkan menuju model tata kelola yang lebih manusiawi, bertanggung jawab, dan selaras dengan tujuan kemaslahatan bersama.

BIBLIOGRAPHY

- Abdurrahman, Zahron. "Islamic ethical governance: An integrated model for corruption prevention." *Kurva Jurnal Ekonomi Manajemen Keuangan dan Bisnis* 2 (April 2025): 1–19. <https://doi.org/10.53088/kurva.v2i2.2245>.
- Amri, Yassirli, dan Lara Indah Yandri. *ALGORITMA MEDIA SOSIAL DAN POLARISASI POLITIK DALAM DEMOKRASI DIGITAL DI INDONESIA*. 4, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.31869/jsp.v4i2.7608>.
- Besari, Anam, Vicheka Rith, dan Ravi Dara. "Reconfiguring Islamic Authority in Indonesia: The Role of Ulama and Digital Media in Religious Practices." *Journal of Noesantara Islamic Studies* 2, no. 3 (2025): 139–51. <https://doi.org/10.70177/jnis.v2i3.2396>.
- Fathilah, Sultan Akrabu, Ana Fitriyani, dan Syamsul Bahtiar. "Konstruksi Realitas Sosial Melalui Algoritma Media Digital Dalam Perspektif Ilmu Sosial Modern Indonesia." *PERSEPTIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 3, no. 4 (2025): 174–82. <https://doi.org/10.70716/perseptif.v3i4.453>.
- Hakiki, Ikrar, Edi Hermanto, Ali Akbar, M. Ziyah Adabi, dan Ferdi Hasayangan Dalimunthe. "Politik Dalam Al Qur'an." *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4 (2025): 770–75. <https://doi.org/10.63822/9qcjke66>.
- Hefni, Wildani. "Moderasi Beragama Dalam Ruang Digital: Studi Pengarusutamaan Moderasi Beragama Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri." *Jurnal Bimas Islam* 13, no. 1 (2020): 1–22. <https://doi.org/10.37302/jbi.v13i1.182>.
- Hidayatullah, Rahmat. "Otoritas Keagamaan Digital: Pembentukan Otoritas Islam Baru Di Ruang Digital." *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 2024, 1–16. <https://doi.org/10.15408/ushuluna.v10i2.42831>.
- Istiqomah, Dina, Muhammad Rusidi, dan Opi Yensi. "Tafsir Digital: Antara Adaptasi Dan Krisis Otoritas Keagamaan." *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi* 4, no. 1 (2025): 41–56. <https://doi.org/10.31958/lathaif.v4i1.15416>.
- Kannike, Uthman Mohammed Mustapha, dan AbdulGafar Olawale Fahm. "Exploring The Ethical Governance of Artificial Intelligence from An Islamic Ethical Perspective." *Jurnal Fiqh* 22, no. 1 (2025): 134–61. <https://doi.org/10.22452/fiqh.vol22no1.5>.
- Ma'rifat, Aulia Karimatul. "Mrs Fenomena Influencer Muslim dan Otoritas Penafsiran Al-Qur'an di Era Digital: Kajian atas Pergeseran Otoritas Keagamaan di Media Sosial." *JURNAL PUSAKA: Media Kajian dan Pemikiran Islam* 15, no. 1 (2025): 52–61. <https://doi.org/10.35897/ps.v15i1.1965>.
- Mohadi, Mawloud, dan Yasser Tarshany. "Maqasid Al-Shari'ah and the Ethics of Artificial Intelligence: Contemporary Challenges." *Journal of Contemporary Maqasid Studies* 2 (Juli 2023): 79–102. <https://doi.org/10.52100/jcms.v2i2.107>.
- Purboyo, Muhammad Guntur, Azis Amriwan, Junaidi Junaidi, Branden Jaya Tivantara, dan Hanif Dinanda Putra. "Ambivalensi Politik Digital: Algoritma, Gamifikasi, Dan

Polarisasi Generasi Z Di TikTok.” *Jurnal Sosiologi Andalas*, 11 Oktober 2025, 172–90. <https://doi.org/10.25077/jsa.11.2.172-190.2025>.

Shofa, Mila Faila, Ainun Yudhistira, dan Syafawi Ahmad Qadzafi. “DIGITAL RELIGION AND SHIFTING RELIGIOUS AUTHORITY: UNDERSTANDING PEOPLE’S BEHAVIOUR IN ACCESSING ISLAMIC WEBSITES.” *Al-A’raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat* 22, no. 1 (2025): 118–46. <https://doi.org/10.22515/ajpif.v22i1.10454>.

Siregar, Muhammad Habibi. *Digital Fiqh and Ethical Governance: Negotiating Islamic Normativity and Online Narcissism in Contemporary Indonesia*. t.t.

Telfah, Sajida Khoirulloh, Suci Laela Nazwa, Livia Herliani, dan Fiqra Muhammad Nazib. “Etika Bermedia Digital Dalam Perspektif Pendidikan Islam.” *Al-Ilmiya: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 4 (2026): 1441–51.

Wahyuti, Tri, Fitri Sarasati, Riski Mohamad Baskoro, Herman Paninggiran, dan Bagus Sudarmanto. “ALGORITMA, ECHO CHAMBER, POLARISASI, DAN VIRALITAS DI TIKTOK PADA PEMILIHAN PRESIDEN 2024.” *Konvergensi: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 6, no. 2 (2025): 264–78. <https://doi.org/10.51353/5f442c71>.